



ANALISA KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017-2021 TERKAIT ANCAMAN PENGANGGURAN PASCA KENAIKAN INFLASI

Alex^a, Joycelin^b, Michelle Selvia Liu^c, Selvia Eka Marlina^d, Shelvi^e, Hery Haryanto^f

^a Fakultas Bisnis dan Manajemen, 2141110.alex@uib.edu, Universitas Internasional Batam

^b Fakultas Bisnis dan Manajemen, 2141003.joycelin@uib.edu, Universitas Internasional Batam

^c Fakultas Bisnis dan Manajemen, 2141245.michelle@uib.edu, Universitas Internasional Batam

^d Fakultas Bisnis dan Manajemen, 2141283.selvia@uib.edu, Universitas Internasional Batam

^e Fakultas Bisnis dan Manajemen, 2141260.shelvi@uib.edu, Universitas Internasional Batam

^f Fakultas Bisnis dan Manajemen, hery.haryanto@uib.edu, Universitas Internasional Batam

Abstract

Inflation and unemployment are the most important performance descriptions in a country's macro economy, the difficulty in overcoming these two problems is not only experienced by developing countries, but also experienced by developed countries. The relationship between the inflation rate and the unemployment rate affects the mix of fiscal and monetary policy decisions of a country to achieve better economic conditions. The existence of a trade-off that occurs between inflation and unemployment is known as the Phillips Curve. However, an interesting phenomenon that often occurs in Indonesia is when the unemployment rate is high, the inflation rate is still high. This study aims to analyze the decision making of the provincial government of DKI Jakarta in terms of responding to the threat of an increase in the unemployment rate after the increase in the inflation rate by using time series data over a span of 5 years, starting from 2017-2021.

Keywords: Inflation, Unemployment, DKI Jakarta, Macro Economy.

Abstrak

Inflasi dan pengangguran merupakan gambaran kinerja terpenting dalam ekonomi makro suatu negara, sulitnya mengatasi kedua masalah tersebut tidak hanya dialami oleh negara berkembang, tetapi juga dialami oleh negara maju. Hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran mempengaruhi bauran keputusan kebijakan fiskal dan moneter suatu negara untuk mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik. Adanya trade-off yang terjadi antara inflasi dan pengangguran dikenal dengan Kurva Phillips. Namun fenomena menarik yang sering terjadi di Indonesia adalah ketika tingkat pengangguran tinggi, tingkat inflasi masih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengambilan keputusan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam menyikapi ancaman kenaikan angka pengangguran pasca kenaikan angka inflasi dengan menggunakan data time series selama rentang waktu 5 tahun, dimulai dari 2017-2021.

Kata Kunci: Inflasi, Pengangguran, DKI Jakarta, Ekonomi Makro.

1. PENDAHULUAN

Inflasi dan pengangguran adalah dua ukuran kinerja ekonomi suatu negara, hubungan antara dua variabel tersebut merupakan masalah ekonomi makro yang sering diperdebatkan dalam praktik ekonomi. Keterkaitan antara inflasi dan tingkat pengangguran memengaruhi bauran pengambilan kebijakan suatu negara untuk mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik di masing-masing negara [1].

Pengangguran merupakan salah satu masalah mendasar perekonomian nasional baik di negara maju maupun negara berkembang. Kurangnya tingkat penyerapan tenaga kerja maupun pembukaan lapangan kerja menjadi permasalahan penting terutama di negara yang memiliki jumlah penduduk dan angka kelahiran yang tinggi. Pengambilan kebijakan oleh pemerintah suatu negara diperlukan agar dapat menurunkan tingkat pengangguran dan juga menjadi salah satu amanat yang tertera dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”.

Pengambilan kebijakan dalam hal menurunkan tingkat pengangguran berkaitan erat dengan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan mempertahankan agar nilai rupiah tetap stabil. Untuk mencapai tujuan tersebut, terhitung sejak tanggal 1 Juli

2005, Bank Indonesia telah memperkenalkan kerangka kebijakan moneter *Inflation Targeting Marketing* (ITF) untuk mencapai target inflasi yang sudah ditetapkan secara nasional sebagai indikator yang sudah ditetapkan. Dalam hal menyikapi dinamika perubahan dan tantangan perekonomian ke depannya, Bank Indonesia juga telah memperkuat kerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas[1].

Penelitian yang dilakukan oleh A. W. Phillips ketika Amerika Serikat dilanda krisis ekonomi pada tahun 1929, mendapati bahwa terdapat korelasi negatif yang erat antara inflasi dan pengangguran yang berarti tingkat pengangguran akan turun ketika terjadi lonjakan tingkat inflasi yang tinggi. Adanya *trade-off* yang terjadi antara inflasi dan pengangguran tersebut hingga kini dikenal sebagai Kurva Phillips. Namun, terdapat fenomena menarik yang sering terjadi di Indonesia adalah ketika tingkat pengangguran tinggi, tingkat inflasinya juga masih tetap tinggi[4]. Padahal, target yang diinginkan sebagai jawaban untuk kedua hal tersebut adalah rendah.

Oleh karena itu, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pengambilan kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam hal menjawab ancaman kenaikan tingkat pengangguran pasca naiknya tingkat inflasi dengan menggunakan data *time series* selama waktu rentang 5 tahun, yaitu mulai dari tahun 2017-2021 yang telah diolah dan dirangkum oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jakarta.



Gambar 1. Perbandingan Tingkat Inflasi dan Tingkat Pengangguran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021
Sumber: BPS, 2017-2021

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengangguran

Menurut *Bureau of Labor Statistics*, *labor force* terbagi menjadi tiga. Pertama, pekerja yang merupakan karyawan yang dibayar, bekerja sendiri, dan pekerja tidak dibayar dalam bisnis keluarga. Kedua, orang yang tidak bekerja dan telah mencari pekerjaan selama 4 minggu berturut-turut. Terakhir, tidak dalam angkatan kerja yang terdiri dari bayi, anak kecil, lansia, dan sebagainya. Pengangguran atau *unemployment* adalah situasi saat seseorang yang termasuk pada kategori *labor force* atau angkatan kerja yang tidak bekerja dan secara aktif tidak dalam keadaan mencari pekerjaan[12]. Pengangguran menjadi salah satu faktor yang memicu kemiskinan yang ada di Indonesia.

2.2. Jenis Pengangguran

Terdapat 2 jenis pengangguran sebagaimana yang dijelaskan pada poin di bawah berikut ini:

1. *Frictional unemployment* atau pengangguran friksional merupakan pengangguran yang menghabiskan waktunya untuk mencari pekerjaan sesuai dengan keinginan dan keterampilan mereka.
2. *Structural unemployment* atau pengangguran struktural merupakan orang yang menjadi pengangguran karena sedikitnya lowongan pekerjaan dalam dunia industri.

2.3. Dampak Pengangguran

Dampak pengangguran terhadap perekonomian yakni sebagai berikut:

- a. Tingkat pengangguran yang tinggi akan menghambat pertumbuhan ekonomi.

- b. Pengangguran mengakibatkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kesejahteraan yang mungkin dicapainya.
- c. Pengangguran mengakibatkan pendapatan pajak pemerintah berkurang, sebab perolehan pendapatan pajak yang menurun dan dapat berdampak pada penurunan kemampuan pemerintah dalam menjalankan kegiatan pembangunan.

2.4. Faktor Penyebab Terjadinya Pengangguran

Berikut ini merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran di sebuah negara antara lain:

1. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan, sebab tanpa pengetahuan, masyarakat akan kesulitan dalam mengerjakan pekerjaannya.
2. Persebaran industri yang tidak merata menyebabkan masyarakat kesulitan untuk bekerja. Apabila domisili masyarakat jauh dari tempat bekerja, maka tentu akan menjadi bahan pertimbangan dari pekerja itu sendiri karena terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan seperti biaya transportasi yang kemungkinan akan menyebabkan kerugian pada pekerja tersebut.
3. Setiap perusahaan memiliki kriteria terhadap calon karyawan yang akan direkrut terutama dalam hal keterampilan. Individu yang memiliki keterampilan atau *skill* yang rendah cenderung menghambat proses individu tersebut untuk terjun ke dunia kerja.
4. Gaji yang cenderung rendah akan menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk bermalas-malasan dibandingkan bekerja dengan gaji yang rendah.

2.5. Inflasi

Inflasi adalah situasi terjadinya kenaikan harga secara terus-menerus dari sebagian besar barang dan jasa[5]. Inflasi terjadi dengan kenaikan harga umum, baik barang, jasa ataupun faktor produksi. Jika tingkat inflasi semakin tinggi pada suatu perekonomian, maka akan menyebabkan perubahan *output*, kesempatan kerja, dan menyebabkan pengangguran atau ketidakstabilan dalam perekonomian. Secara umum, inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan dari ketidakstabilan perekonomian yang berakibat pada naiknya harga barang dan jasa dengan terus menerus, dan berdampak pada semakin tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Salah satu penyebab inflasi yaitu meningkatnya jumlah uang beredar yang menyebabkan masyarakat menjadi konsumtif sehingga terjadi peningkatan permintaan barang. Semakin tinggi angka permintaan barang, maka persediaan faktor produksi menjadi menurun. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kenaikan inflasi.

2.6. Hubungan Inflasi dan Pengangguran

Kenaikan inflasi yang terjadi dapat berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun. Hal itu akan menyebabkan beberapa perusahaan melakukan PHK terhadap sejumlah karyawan dan tidak akan merekrut karyawan hingga waktu yang tidak dapat ditentukan. Masalah tersebutlah yang dapat memicu meningkatnya angka pengangguran pada sebuah negara.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif yakni data berupa hasil riset dianalisis lebih lanjut untuk memperoleh solusi pemecahan masalah dan metode penelitian survei yakni menggunakan data BPS (Badan Pusat Statistik) untuk mengetahui variabel yang berhubungan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa teknik studi pustaka, yakni dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan bersumber dari berita, artikel ilmiah, buku, dan sumber lainnya secara tertulis. Peneliti menggunakan alternatif *internet searching* untuk mengumpulkan data yang didukung oleh teknologi *search engine* di mana segala informasi yang ingin diketahui dapat ditemukan oleh peneliti. Peneliti kemudian melakukan reduksi data berupa mengolah data, menggolongkan data, dan melakukan penyederhanaan data yang akan dianalisis. Terakhir, peneliti akan menarik kesimpulan sebagai hasil akhir dari analisa dan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DKI Jakarta

Berdasarkan data pada Februari 2022 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat bahwa jumlah pengangguran di DKI Jakarta berjumlah sebesar 410,59 ribu jiwa dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8% dari total angkatan kerjanya yang berjumlah sebanyak 5,13 juta jiwa. Penduduk dengan usia kerja di DKI Jakarta mencapai 8,25 juta jiwa dengan rincian jumlah yang bekerja sebanyak 4,72 juta jiwa dan yang menganggur sebanyak 410,59 ribu jiwa.

IS_Kabkota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2019	2020	2021
DKI Jakarta	6,22	10,95	8,50

Gambar 2. TPT DKI Jakarta Periode 2019-2021
Sumber: BPS, 2019-2021

Berdasarkan data TPT DKI Jakarta pada periode 2019-2021 menunjukkan bahwa persentase TPT dari tahun ke tahun cukup fluktuatif dalam mengalami peningkatan dan penurunan. Persentase TPT pada tahun 2020 meningkat pesat terdampak dari pandemi Covid-19 yang membuat hampir semua sektor industri mengalami penurunan kinerja hingga terpaksa mengambil keputusan untuk melakukan PHK sehingga memicu meningkatnya pengangguran di DKI Jakarta pada periode tersebut.

4.2 Faktor yang Memicu Tingginya Tingkat Pengangguran di DKI Jakarta

Faktor utama yang mendorong peningkatan pengangguran di DKI Jakarta yakni perbandingan antar pertumbuhan pengangguran dan kesempatan kerja yang tidak seimbang. Selain itu, DKI Jakarta merupakan Ibu Kota negara Indonesia yang menjadi pusat aktivitas serta perekonomian Indonesia, hal ini tentunya mendorong persaingan dunia kerja di Jakarta lebih ketat dibanding kota biasa. Dampak dari pandemi Covid-19 pada tahun 2020 silam juga menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya pengangguran di DKI Jakarta yang masih dirasakan hingga sekarang walaupun ekonomi perlahan sudah mulai memulih. Selain itu, ketimpangan sosial yang ada seperti kemiskinan dan tingkat pendidikan maupun keterampilan yang rendah menghambat proses penyerapan tenaga kerja sehingga hal tersebut juga mendorong terjadinya pengangguran di DKI Jakarta. Kemajuan teknologi dan perkembangan yang ada juga membuat sebagian orang tidak mampu beradaptasi dengan transformasi dunia kerja yang berimbas pada kemampuan penyerapan tenaga kerja. Tingkat urbanisasi Jakarta yang tinggi serta selesainya proyek besar juga menjadi faktor pemicu tingginya angka pengangguran di daerah tersebut.

4.3 Dampak Pengangguran terhadap Perekonomian DKI Jakarta

Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menurunkan tingkat kesejahteraan dari suatu daerah begitu juga dengan DKI Jakarta. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta dapat terhambat sehingga hal tersebut dapat menghambat laju pertumbuhan perekonomian negara terutama karena DKI Jakarta merupakan Ibu Kota negara. Pengangguran dapat berdampak pada penurunan daya beli masyarakat sehingga hal tersebut juga berimbas pada GDP (*Gross Domestic Product*) yang menjadi salah satu indikator yang mengukur pertumbuhan ekonomi negara. Selain berdampak pada perekonomian daerah, pengangguran juga berpotensi meningkatkan kriminalitas dari suatu daerah jika tidak segera diatasi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dampak dari pengangguran melingkup secara luas pada kehidupan masyarakat dan kondisi negara, baik secara ekonomi, sosial, maupun yang lainnya.

4.4 Fenomena Kenaikan Inflasi dan Hubungannya dengan Tingkat Pengangguran

Tingkat kenaikan inflasi Indonesia berdasarkan data yang diambil hingga September 2022 yakni sebesar 4,84%. Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Indonesia mengatakan bahwa penyebab laju inflasi tahun 2022 ini dipicu oleh beberapa faktor seperti kenaikan harga komoditas global dan gangguan rantai pasok. Tingkat inflasi yang tinggi dapat memicu menurunnya daya beli masyarakat yang dapat berdampak pada GDP dan pertumbuhan perekonomian negara.

Terdapat korelasi negatif antara kenaikan inflasi terhadap kondisi pengangguran sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Phillips, 1958) yang hingga kini dikenal sebagai Kurva Phillips. Hal tersebut dapat dijelaskan karena ketika inflasi meningkat, maka nilai riil mata uang akan menurun sehingga tentu perusahaan akan membuka lowongan pekerjaan sebanyak mungkin karena dapat membayar para karyawan dengan upah yang sama sebelum terjadinya inflasi. Namun, terdapat kecenderungan yang berbeda dan terjadi di Indonesia, yaitu ketika inflasinya tinggi, tingkat pengangguran juga tinggi. Hal ini tercermin pada data yang digunakan sebagai perbandingan antara inflasi dengan tingkat pengangguran di provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017-2021 pada gambar 1 yang disajikan sebelumnya. Dapat kita lihat bahwa fenomena yang

terjadi di Indonesia sangat berbanding terbalik dengan hasil penelitian menggunakan kurva Phillips, hal tersebut tentu menimbulkan tanda tanya dan membuat pemerintah harus berpikir ulang dalam hal pengambilan kebijakan untuk menekan tingkat inflasi maupun tingkat pengangguran sehingga ditemukan titik keseimbangan yang dapat menjawab dua persoalan tersebut.

4.5 Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi

Pemerintah memegang andil besar dalam menangani pengangguran dan inflasi yang terjadi melalui kebijakan yang diterapkannya. Tindakan yang tengah ditempuh oleh pemerintah DKI Jakarta dalam menangani pengangguran yakni dengan menerapkan kebijakan yang berorientasi dalam mendorong pertumbuhan sektor perekonomian melalui perancangan platform yang mendukung kreasi, fasilitasi, dan kolaborasi pada suatu program yang terpadu yang dinamai sebagai Jakpreneur. Program tersebut tertuju pada pengembangan UMKM melalui ekosistem kewirausahaan seperti *start up*, institusi pembiayaan, serta pendidikan yang diharapkan mampu menjadi wadah bagi UMKM dalam turut andil menyerap tenaga kerja sehingga dapat menekan angka pengangguran. Melalui program tersebut, diharapkan dapat mendorong jumlah pengusaha baru yang dapat berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Pemprov DKI juga rutin menyelenggarakan bursa pasar kerja yang dapat menjadi opsi yang potensial dalam menyerap tenaga kerja dan menekan angka pengangguran yang ada, hanya saja penyelenggaraan ini sempat terkendala akibat pandemi dan kini sudah mulai diselenggarakan kembali.

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya sudah mempertimbangkan beberapa opsi yang dapat digolongkan cukup solutif tetapi sayangnya tidak semuanya terealisasi, contoh solusi yang pernah dipertimbangkan yakni pembukaan kesempatan kerja dengan merekrut Pegawai Harian Lepas (PHL), mengantisipasi lonjakan urbanisasi yang terjadi setiap tahun, peningkatan akses pelatihan, serta pembebasan persyaratan pendidikan formal bagi warga dalam mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Terdapat beberapa upaya yang dapat dipertimbangkan oleh Pemprov DKI Jakarta, seperti upaya dalam memfokuskan pengembangan industri padat karya dibandingkan industri padat modal dikarenakan tingkat penyerapan tenaga kerja pada industri padat karya lebih tinggi sehingga hal ini dapat menekan angka pengangguran, industri padat modal cenderung memiliki permintaan tenaga kerja yang lebih rendah sehingga hal ini dapat berimbas pada peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan.

Pemerintah dapat mendorong investasi dalam penyediaan tenaga kerja yang dapat berdampak baik pada penciptaan kesempatan kerja dan stabilitas perekonomian. Kemudahan akses terhadap pelatihan juga dapat diperhatikan mengingat tingkat kemampuan masyarakat yang tidak merata akibat keterbatasan pendidikan maupun pelatihan yang diperoleh. Pemerintah juga perlu konsisten dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena jika peningkatan dan pemerataan ekonomi baik, maka akan berdampak positif terhadap penciptaan kesempatan kerja. Solusi lainnya yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam menangani pengangguran yakni dengan penyediaan sarana pengembangan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat ditempuh melalui pengadaan pelatihan dan peningkatan mutu pendidikan, menyederhanakan perizinan yang dianggap menghambat efisiensi proses (deregulasi), pengembangan potensi dan sektor dari daerah-daerah tertentu yang potensial, pertimbangan terkait kegiatan ekonomi informal, pendirian balai-balai maupun pusat latihan kerja, serta upaya lainnya yang berpotensi dalam memperluas lapangan kerja sehingga angka pengangguran dapat ditekan melalui solusi-solusi yang telah disebutkan sebelumnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dianalisis mengenai kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021 terkait ancaman pengangguran pasca kenaikan inflasi, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah DKI Jakarta untuk mengurangi pengangguran dalam skala luas adalah mengembangkan industri padat karya dibandingkan industri padat modal. Dalam hal ini, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem yang baik bagi munculnya pebisnis baru yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja secara luas dan jangka panjang. Adapun pemerintah DKI Jakarta dapat melanjutkan program Jakpreneur untuk mengembangkan UMKM dan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak.

Untuk mengimbangi penciptaan lapangan kerja yang bertumbuh, pemerintah juga perlu berupaya di bidang pendidikan dan keterampilan masyarakat melalui investasi pada kemudahan akses pelatihan dan penyediaan sarana balai latihan kerja. Untuk mengatasi pengangguran akibat urbanisasi, pemerintah dapat menekannya melalui perekrutan Pegawai Harian Lepas (PHL). Di bidang ekonomi, pemerintah berperan penting dalam menjalankan kewajibannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan mencegah terjadinya kenaikan

inflasi lebih lanjut. Ketika inflasi tidak bisa dihilangkan, pemerintah wajib menciptakan lingkungan baik bagi pebisnis untuk meminimalisir dampak inflasi seperti kebangkrutan perusahaan yang berujung pada pengangguran yang meningkat. Oleh karena itu, upaya pemerintah DKI Jakarta untuk mengurangi pengangguran secara keseluruhan berupa penciptaan lapangan kerja yang luas dan penyediaan fasilitas seperti pelatihan, pendidikan, dan pengembangan bagi UMKM dan masyarakat pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Annazah, N. S., & Rahmatika, N. "Analisis Hubungan Tingkat Pengangguran dan Inflasi: Studi Kasus di ASEAN 7." *Jurnal Ketenagakerjaan*, Volume 14, Issue 2, 2019, Pages 153-163.
- [2] Azwar. "Inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan: Analisis Hubungan Dinamis Inflasi Komoditas Barang/Jasa." *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, Volume 9, Issue 1, 2016, Pages 47-66.
- [3] Bappeda Jakarta. "Pengangguran Berkurang, Tenaga Kerja Semakin Berkualitas." Internet: <https://bappeda.jakarta.go.id/pengangguran-berkurang-tenaga-kerja-semakin-berkualitas-2/>, 2021 [Okt. 17, 2022].
- [4] Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN. "Analisa Keberadaan Tradeoff Inflasi dan Pengangguran (Kurva Phillips) di Indonesia." 2014.
- [5] Boediono. *Ekonomi Mikro*. DI Yogyakarta, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- [6] CNN Indonesia. "10 Cara Mengatasi Pengangguran di Indonesia." Internet: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220129095139-97-753184/10-cara-mengatasi-pengangguran-di-indonesia/2>, 2022 [Okt. 17, 2022].
- [7] Imanto, R, et. al. "Pengaruh Pengangguran dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 11, Issue 2, 2020, Pages 118-139.
- [8] Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [9] Ma'ruf, M. M. A., & Priana, W. "Analisis Pengaruh Angkatan Kerja, Investasi, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Tuban." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 1, Issue 9, 2022, Pages 2978-2988.
- [10] Malik, A. "Sri Mulyani Ungkap Sebab Inflasi Meroket Tinggi, Ini Cara Agar Uangmu Aman dan Cuan." Internet: <https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2022-08-02/sri-mulyani-ungkap-sebab-inflasi-meroket-tinggi-ini-cara-agar-uangmu-aman-dan-cuan>, 2022 [Okt. 17, 2022].
- [11] Meydiasari, D. A., & Soejoto, A. "Analisis Pengaruh Distribusi Pendapatan, Tingkat Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap IPM di Indonesia." *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen dan Keuangan*, Volume 1, Issue 2, 2017, Pages 116-126.
- [12] Nanga, M. *Makro Ekonomi: Teori, Masalah, & Kebijakan*. DKI Jakarta, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- [13] Panjaitan, D. V, et. al. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Tenaga Kerja dalam Program Kartu Prakerja." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Volume 10, Issue 1, 2021, Pages 20-43.
- [14] Phillips, A. W. "The Relationship between Unemployment and the Rate of Change of Money in the UK 1861-1957." *Economica*, Volume 25, 1958, Pages 283-299.
- [15] Pratikto, M. I. S., & Rachmawati, L. "Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Inflasi di Kota Surabaya." *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, Volume 1, Issue 3, 2013.
- [16] Rianda, C. N. "Analisis Dampak Pengangguran Berpengaruh terhadap Individual." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Volume 12, Issue 1, 2020, Pages 17-26.
- [17] Romhadhoni, P, et. al. "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta." *Jurnal Matematika Integratif*, Volume 14, Issue 2, 2018, Pages 115-121.
- [18] Salim, A, et. al. "Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Volume 7, Issue 1, 2021, Pages 17-28.

- [19] Sugianto, & Yul, Y. T. P. “Faktor Penyebab Pengangguran dan Strategi Penanganan Permasalahan Pengangguran pada Desa Bojongcae, Cibadak Lebak Provinsi Banten.” *Ikraith-Ekonomika*, Volume 3, Issue 2, 2020, Pages 54-63.
- [20] Swaramarinda, D. R. “Analisis Dampak Pengangguran terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (JPEB)*, Volume 2, Issue 2, 2014, Pages 63-70.
- [21] Utomo, F. W. “Pengaruh Inflasi dan Upah terhadap Pengangguran di Indonesia Periode Tahun 1980-2010.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Volume 1, Issue 2, 2013.